

BAB II

KAJIAN PUSTAKA:

1. Pembangunan Kehutanan, Deforestasi Dan Masyarakat Adat

Paradigma pembangunan yang diterapkan di Indonesia terhadap pengembangan masyarakat masih banyak menggunakan model *top down*. Model ini ternyata kurang efektif dan melemahkan kreatifitas masyarakat terutama masyarakat adat. Pada hal mereka sendiri sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut berpartisipasi dalam memutuskan dan menentukan arah dan subyektifitas pembangunannya.

Terbukti selama ini, paradigma pembangunan dengan menghadirkan perusahaan besar yang mengacu pada peningkatan produksi saja tanpa melihat aspek lingkungan akan berdampak pada eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran¹. Kenyataan ini berimbas hingga kepada suku-suku tradisional, seperti suku Talang Mamak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Imbas ini disebabkan karena dalam masyarakat adat, tanah punya fungsi sosial yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Bentuk kesepakatan bersama (*consensus*) tentang tanah ini oleh masyarakat Talang Mamak sebenarnya sudah ada sejak dahulu, mereka membagi-bagi hutan dengan 4 kriteria, yaitu; *hutan sialang*, *hutan puaka* (*puhun*), *hutan simpanan*, dan *hutan peladangan*. Pembagian ini mirip seperti halnya di Jawa tanah punya fungsi *sengkeran* dimana hasil dari tanah tersebut

¹ Bukti- bukti bahwa penetrasi kapital menyebabkan kerugian di pihak petani, dapat disimak misalnya dari kajian : Dianto Bachriadi, *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996. Edward Goldsmith dan Nicholas Hilyard, *Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*, Yayasan Obor Indonesia, 1993. Liem Teck Gie

dimanfaatkan untuk acara bersih desa. Tanah *titisara* yang hasilnya untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Kemudian tanah *guron* yang dipergunakan untuk pendidikan. Tanah *pangonan* yang digunakan untuk ternak, tanah *ganjaran* untuk biaya hidup pamong desa, tanah *cawisan* yang digunakan untuk para tamu desa.

Tapi dalam perkembangannya, kemudian fungsi-fungsi tanah tersebut hilang yang ada tinggal tanah *ganjaran*. Itupun sudah mulai hilang seiring dengan digantinya kepala desa jadi lurah yang digaji pemerintah. Padahal tidak otomatis pergantian tersebut menjadikan kepemilikan tanah bergeser ke pemerintah. Inilah konflik yang kemudian marak muncul di beberapa tempat lainnya. Dan perlu dipahami pula bahwa tanah tidak hanya berdimensi ekonomi sehingga cukup diberi ganti rugi uang. Tanah juga punya dimensi religi, sosial maupun solidaritas yang menjadi sumber integrasi sosial (Anonim, 2002;3). Sementara itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang selama ini menjadi benteng pertahanan terakhir kaum tani, secara substansial (misalnya *land reform*) sejak Orde Baru berkuasa tidak pernah dilaksanakan atau dalam sosiologi hukum disebut *dead letter*.

Bila kita runtut ke belakang, ketika UUPA dilahirkan pada tahun 1960, suasana saat itu antimodal asing. Berbeda dengan saat ini, kehadiran modal asing sudah menjadi kebutuhan negara. Demikian pula, secara ideologis, tanah untuk petani (*land to the tiller*) yang diamanatkan dalam UUPA tidak lagi menjadi kenyataan, tetapi sudah menjadi objek spekulasi dan komoditas. Bahkan, pada fase kapitalisme global, tanah tidak lagi menjadi nilai guna tetapi

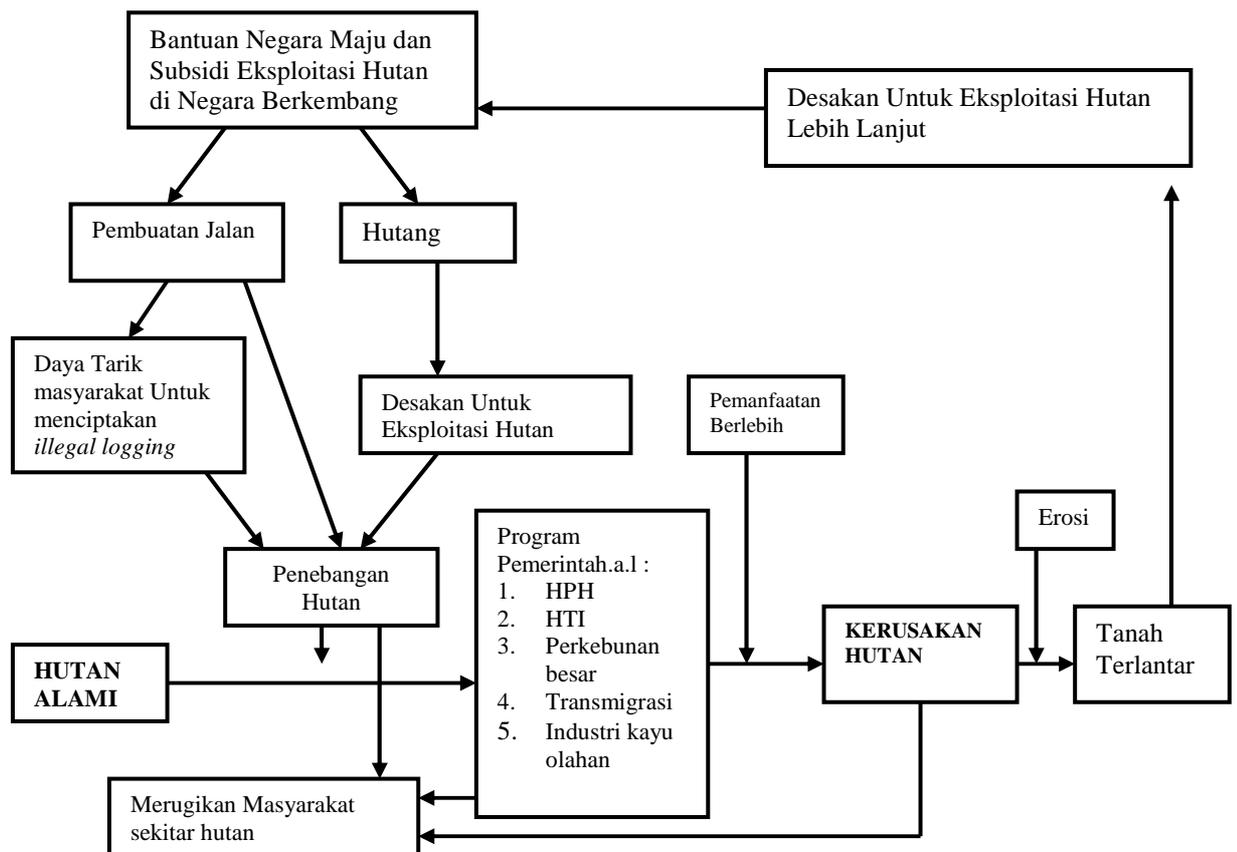
dan Alberto Gomes, *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, 1993

berubah menjadi nilai tukar dalam bentuk saham -saham yang setiap saat dapat diperjualbelikan melalui pasar bebas.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kini zaman sudah berubah. Para petani (baca; peladang) tidak lagi selalu berhadapan dengan tuan tanah, tetapi langsung dengan pemodal besar. Jika demikian, penetrasi kapital berskala global tak terbendung lagi yang pada akhirnya melahirkan proletarisasi besar-besaran.

Berbicara mengenai eksploitasi hutan, eksploitasi hutan di Indonesia terjadi sejak awal 1970-an (di Riau sendiri sejak awal 1974). Pemerintah membutuhkan dana pembangunan guna membangun Indonesia, dan hutan seperti halnya minyak dianggap sebagai sumberdaya ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber dana pembangunan. Untuk itu pemerintah mengundang para pemilik modal dalam dan luar negeri, untuk mengusahakan hutan di Indonesia secara komersial. Kebijakan kehutanan ini memang mampu mencapai tujuan nasional yakni naiknya pendapatan negara melalui ekspor kayu. Namun bagi kaum peladang pengelolaan hutan secara komersial telah mempersempit *lebensraum* mereka guna mempertahankan kehidupan mereka, karena para peladang untuk mendapatkan hasil dari hutan menjadi hilang dengan hadirnya perusahaan kehutanan itu.

Selanjutnya untuk memperjelas bagaimana proses kerusakan dan eksploitasi hutan di Indonesia dapat diamati dari sajian berikut:



Gambar 2.1. Diagram Proses Kerusakan Hutan

Sumber: Diubah dan ditambah dari Haryadi (tanpa tahun; 8)

Introduksi dan model pengembangan usaha sektor swasta yang berekspansi ke daerah pedesaan “ selalu menimbulkan konflik “ antara pemilik modal dengan masyarakat karena berbeda kepentingan. Titik picu konflik tersebut timbul dengan perbedaan kepemilikan modal dalam mengelola sumberdaya alam. Konsekuensinya, masyarakat tradisional yang miskin menjadi termarginalkan dan menanggung dampak dari aktivitas perusahaan tersebut.

Bila kita runtut ke belakang, sebenarnya perjalanan panjang berbagai bentuk modernisasi pertanian dengan ciri kapitalis sebenarnya tidak saja di

Indonesia, tetapi juga terdapat di seluruh dunia. Sebagai contoh ialah perusahaan pertanian di Amerika Utara, peternakan di Amerika Latin, industri pertanian di Eropa Timur. Namun model penetrasi kapital di bidang pertanian yang bercorak kapitalistik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang paling umum adalah pola perkebunan (*plantation*), HPH, HTI, dan PIR yang kesemuanya selalu dibiayai dari pihak luar atau swasta nasional.

Masyarakat tradisional Indonesia yang pada mulanya hanya mengenal sistem kebun (*garden system*), sedangkan sistem pertanian komersial (*commercial agriculture*) yang merupakan basis sistem pertanian dan perkebunan Eropa baru dikenal oleh masyarakat sejalan dengan datangnya kolonialisme dan imperialisme VOC di Indonesia. Perubahan dari sistem kebun tradisional yang mempunyai corak subsisten ke sistem perkebunan Eropa, pada dasarnya adalah perubahan cara produksi di mana pada sistem yang baru ini lebih bercorak padat modal dan berorientasi pada ekonomi pasar, sedangkan dalam pola tradisional lebih mengarah pada kebutuhan subsistensi mereka petani kecil (Kartodirdjo, 1991;3-7).

Bentuk penetrasi dan penguasaan sumberdaya alam (terutama hutan) di Indonesia bila kita runtut jauh ke belakang, sebenarnya menurut Soepardi (1974); Peluso (1990) dan Simon (1993) pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke 17 telah memperkenalkan model pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang sangat berbeda dengan tradisi pemanfaatan hutan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial menguasai sumberdaya hutan secara sepihak sebagai milik negara, dan menutup akses masyarakat pribumi terhadap sumberdaya hutan. Hutan (terutama hutan jati) di Jawa, dieksploitasi secara besar-besaran untuk

memasok bahan baku industri kapal kayu, pembangunan pabrik-pabrik gula, pembukaan perkebunan, dan lain-lain. Akibatnya kawasan hutan mengalami degradasi yang serius karena eksploitasi dan komersialisasi yang dilakukan pemerintah kolonial lebih dari dua ratus tahun lamanya. Setelah Indonesia menjadi satu negara yang merdeka, pemerintah meneruskan praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan seperti itu. Pemerintah melalui tangan-tangan petugas kehutanan, tetap menjadi penguasa tunggal memonopoli pemanfaatan hutan sebagai komoditi untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara (Nurjaya, 2001; 9-10).

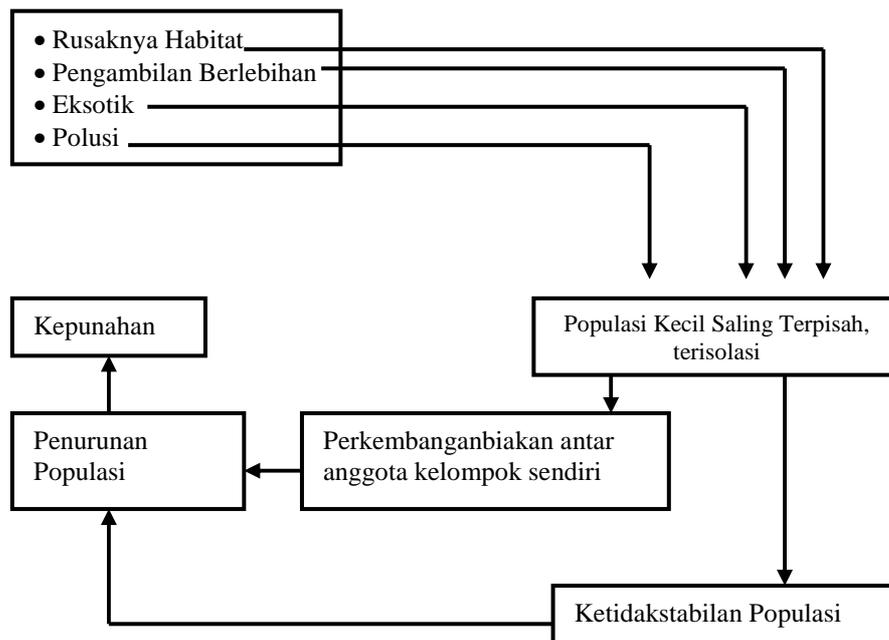
Konsekuensinya, maraknya penetrasi kapital dengan berbagai bentuknya yang masuk ke pedesaan di Indonesia telah pula menimbulkan berbagai kemiskinan di pedesaan. Dampak lebih lanjut dikatakan oleh Poerwanto (2000;197), bahwa kemiskinan di pedesaan seringkali diungkapkan sebagai akibat isolasi dan rusaknya sumber daya alam dengan berbagai sebabnya. Selain itu masuknya berbagai penetrasi kapital ke dalam masyarakat sekitar hutan (hutan) dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada.

Jika hutan tropis ditebangi bukan tidak mungkin akan banyak jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi makanan di masa mendatang sudah punah lebih dulu. Pada hal masyarakat sekitar hutan ketergantungannya terhadap hutan masih sangat tinggi, misalnya, masyarakat Talang Mamak di Riau memanfaatkan 46 jenis tumbuhan untuk pengobatan. Selain untuk obat, masyarakat Talang Mamak memanfaatkan tumbuhan hutan untuk membangun rumah dan peralatan sehari-hari. Balok kayu untuk konstruksi rumah, kulit kayu untuk dinding rumah, daun untuk atap rumah. Hampir 29 jenis kayu yang

ada di hutan dimanfaatkan untuk rumah dan peralatan. Mereka juga memanfaatkan 17 jenis tumbuhan sebagai sumber karbohidrat. Sebanyak 13 jenis tumbuhan hutan dimanfaatkan mereka sebagai sayuran. Hutan juga menyediakan madu, kayu bakar, dan hewan buruan (Anonim, 1999; 4). Hutan yang sehat dapat meningkatkan mutu kehidupan, melestarikan nilai-nilai tradisional dan budaya dan memacu kebanggaan regional dan nasional.

Sebenarnya generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melestarikan hutan bagi generasi mendatang. Hilangnya hutan bagi umat manusia bukan hanya berarti hilangnya kayu tetapi juga berkurang atau tidak ada lagi suplai air bersih dan lebih jauh lagi meningkatkan resiko banjir. Hilangnya serangga bisa menyebabkan berkurangnya panen tanaman pangan yang penyerbukannya tergantung dari serangga.

Kenyataannya masyarakat adat sangat menghargai keragaman hayati karena ketergantungan mereka pada keragaman makhluk hidup sangat nyata. Mereka mengambil berbagai jenis buah yang bisa dimakan, menangkap binatang buruan untuk sumber protein, serat-serat untuk pakaian, bunga dan wangian untuk upacara adat, pemberantas serangga alami, racun untuk menangkap ikan, kayu untuk rumah, tanaman obat yang bisa menyembuhkan sakit gigi atau gigitan ular berbisa, semuanya dari hutan. Non masyarakat hutanlah sebenarnya yang paling banyak mengeksploitasi sumber daya alamnya, karena keter-kaitannya secara langsung tidak pernah mereka rasakan.



Gambar 2.2. Proses Kepunahan Mahluk Hidup

Sumber : Haryadi (tanpa tahun; 10)

Dari skema di atas tampak rusaknya habitat hutan dapat menyebabkan kepunahan populasi. Populasi dimaksudkan di sini dalam arti luas, tidak hanya populasi hewan dan tumbuhan, tetapi juga mahluk manusia yang diam di areal kerusakan habitat. Kondisi ini sudah disinyalir sejak awal oleh Tengku Muhammad Yusuf (2002;2), bahwa masyarakat Talang Mamak dewasa ini menuju kepunahan.

Bila kita bercermin dari sejarah dan peradaban, punahnya suatu populasi dalam dunia manusia, bukanlah baru terjadi dalam dasawarsa sekarang ini saja. Tetapi sejarah membuktikan ada banyak populasi manusia di muka bumi ini yang jumlahnya semakin menurun sebagai akibat tidak mampunya mereka beradaptasi. Sebut misalnya, orang Ainu di Jepang, Aborigin di Australia, Indian di Amerika, dan beberapa suku-suku bangsa kecil di dataran Afrika sana, ini semua selain disebabkan kurangnya adaptif mereka

terhadap perubahan lingkungan, dapat pula disebabkan *genetical drift* yang terjadi diantara sesama mereka yang kurang menguntungkan sebagai akibat perkembangbiakan antar anggota kelompok sendiri yang demikian rapat. Kerapatan model perkawinan endogami ini bisa terjadi karena semakin eksklusifnya mereka dengan dunia di sekitarnya, karena mereka takut terhadap perubahan. Meminjam istilah Merton, Merton menyebutnya dengan sebutan *retreatism*.

Bila hal seperti itu terjadi, apakah ini merupakan konsekuensi dari harga yang harus dibayar oleh mereka, karena mereka tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial-budayanya ?.

Untuk menjawab itu Nurjaya (2001) memberikan rambu-rambu bahwa seringkali pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Artinya proses pembangunan itu tidak selalu membawa hasil yang didambakan, melainkan juga banyak membawa masalah baru. Konsekuensi yang paling buruk adalah proses menyusutnya kebudayaan (*cultural loss*), sehingga banyak masyarakat menjadi kehilangan makna dan pegangan hidup di dunia modern.

Oleh sebab itulah, mengapa ketika masyarakat adat diminta melestarikan hutan biasanya mereka tidak akan bertanya apa-apa. Tapi sebaliknya bagi mereka orang kota akan bertanya, apa manfaat hutan bagi saya? Jawabannya: banyak sekali dan diluar yang dibayangkan. Yang intinya adalah kayu adalah manfaat hutan bagi orang kota yang cukup nyata. Mereka tidak berempati bahwa akibat penetrasi kapital dan kerusakan lingkungan yang dilakukan orang kota, masyarakat adat harus membayar semua kerugiannya.

Tambahan lagi, sekarang ini akibat masuknya berbagai perusahaan industri besar ke daerah pedesaan turut pula mengikis struktur tradisional masyarakat desa. Masyarakat desa yang lugu dan berpendidikan rendah seringkali menjadi termiskinkan oleh keadaan serupa itu. Bahkan masuknya industri yang padat modal, seringkali memunculkan lembaga percukongan baru dan *tengkulak* yang mengurus kemiskinan masyarakat desa menjadi semakin rumit.

Bentuk-bentuk penetrasi ini bukan hanya terjadi untuk kasus-kasus model sekarang ini saja, tetapi juga sejak dahulu zaman Belanda. *Pelzer* mengisahkan bagaimana rakus dan liciknya para pengusaha *onderneming* bersekongkol dengan raja-raja setempat di daerah Sumatera Timur merebut lahan masyarakat dari sejengkal, sehasta, dan dari sehasta menjadi sedepa sampai akhirnya penduduk kehilangan sama sekali lahannya dan terpaksa ikut terlibat dalam *onderneming* untuk memasok kebutuhan lada, tembakau dan tanaman ekspor lainnya pada pengusaha *onderneming* yang mayoritas orang Eropa. Van Vollenhoven sangat mengecam terhadap kebijakan agraria Hindia Belanda ini, ia mengatakan bahwa masa dari tahun 1870 sampai 1920 sebagai masa "setengah abad ketidakadilan" yang menyebabkan rakyat menjadi lemah posisinya dan sangat tergantung pada kebijakan yang dibuat Hindia Belanda (*Pelzer, 1985; 114-117*).

Dan kenyataannya sejarah seperti itu terulang kembali untuk masa kemerdekaan sekarang ini, cuma bedanya dahulu dieksploitasi oleh penjajah Belanda, kini dieksploitasi oleh pengusaha dan pemerintah yang berpihak pada pengusaha.

Oleh karena itu pola *top-down* tidak efektif dalam pembangunan. Pembangunan itu harus banyak melibatkan kepentingan masyarakat yang dibangun, karena bagaimanapun juga adalah masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang harus banyak terlibat dan sesuai dengan aspirasinya. Michael Carnea menjelaskan bahwa selama ini banyak para pengambil kebijakan beranggapan bahwa modernisasi pada masyarakat tradisional (pedesaan) dalam hal sistem pertanian akan mudah diangkat dengan cara peresapan kemajuan teknologi yang diintrodusir ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi ia menjelaskan bagaimanapun pentingnya teknologi dalam pembangunan, tetapi ia (teknologi) tidak akan menjamin keberhasilan yang akan diharapkan tanpa mempertimbangkan unsur lokalitas di dalamnya (Attir dkk, 1989; 145).

Bahkan tidak jarang pencangkakan sistem *penetrasi kapital* baik berupa teknologi, bibit, serta orientasi pada padat modal cenderung melemparkan banyak penduduk menjadi tersisih dari sistem produksi dan proses pemanfaatan produksi. Keadaan ini, seperti yang dikatakan *Samir Amin*, mengakibatkan terjadinya *regressive equilibrium* di sektor pedesaan. Yaitu proses tersingkirnya banyak orang dari sistem produksi sektor pertanian tradisional ini diiringi dengan menurunnya pendapatan riil mereka (Arief dan Sasono, 1984; 57-68). Fenomena ini dijelaskan oleh *Sumartana* secara baik sekali bahwa:

" Proses modernisasi dan pembangunan seringkali ditampilkan sebagai sebuah proses yang berjalan sepihak dan tak mampu menyerap semangat dan kearifan mereka. Dengan demikian pembangunan pada realitasnya tidak lain adalah proses "pemeriksaan" pada suku-suku asli yang nota bene menjadi sasaran perubahan (Sumartana, 1996;viii) “.

Ungkapan Sumartana (1996) di atas, adalah wajar mengingat masuknya berbagai proyek ke daerah pedesaan di daerah Riau, akses mereka terhadap hutan menjadi berkurang. Hal ini semua disebabkan karena penetrasi kapital yang masuk ke daerah mereka kurang menyentuh unsur lokalitas mereka, lebih banyak berupa upaya sentral dan proses transplantasi ketimbang proses transformasi yang lebih memihak rakyat.

Kekuatiran Sumartana (1996) jauh sebelumnya telah dibuktikan oleh Geertz (1983) dengan penelitiannya di Mojokuto tahun 1963, di mana ia memperoleh kesimpulan laju pertumbuhan penduduk di Jawa yang pesat dan masuknya budaya komersialisasi pertanian yang dibawa kolonial Belanda telah merusak tatanan kehidupan masyarakat desa. Akibatnya intensifikasi lahan pertanian di Jawa mengalami kejenuhan dan lambat laun mengarah ke involusi, sehingga kemiskinan penduduk menjadi semakin parah. Secara garis besarnya Geertz hendak mengatakan bahwa masuknya ekonomi padat modal (*capital input*) ke dalam sistem ekonomi tradisional (*labour input*) di Jawa, telah memunculkan involusi dan kemiskinan berbagi.

Selanjutnya Scott (1983) juga menganalisa bahwa penetrasi modernisasi pertanian menyebabkan terkikisnya struktur tradisional, hancurnya nilai kegotong-royongan dan pola hubungan yang menjamin subsistensi peladang, sehingga akibatnya kemiskinan lebih menjadi bagian hidup masyarakat desa. Anggapan Scott ini dianggap terlalu pesimistik dan terlalu didramatisir oleh Popkin. Popkin tidak setuju dengan analisa Scott ini, sebaliknya ia menjelaskan bahwa di balik hubungan patron-klien dan komunitas hubungan

kegotong-royongan, sebenarnya selalu terdapat unsur-unsur eksploitatif dan dominasi oleh patron. Selain itu dari kondisi ini selalu adanya kelompok pembonceng bebas (*free riders*) yang menikmati hasil hubungan tersebut tanpa ikut berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu jalan yang tepat menurut Popkin, untuk melepaskan dari belenggu eksploitasi atas pihak yang kuat pada yang lemah, tidak lain adalah introduksi teknologi maju, komersialisasi dan transformasi petani tradisional menuju petani modern agar mampu berdikari (Popkin, 1979; 34-45).

Analisa Popkin (1979) dibantah oleh Salman (1995), ia menjelaskan bahwa asumsi Popkin ini tidak seluruhnya tepat, karena bagaimanapun juga penetrasi kapital yang masuk ke desa "tidak netral skala". Artinya bahwa tidak semua petani mampu menangkap peluang yang diberikan, hanya mereka yang berlahan luas, memiliki modal, atau dekat dengan birokrat atau jalur-jalur hubungan lain yang dekat dengan sumber dana itu saja yang menikmati hasilnya. Dan ketika desa semakin terbuka terhadap dinamika ekonomi pasar, kelompok yang diuntungkan dan mampu menangkap peluang selalu mereka yang memiliki modal dengan menginvestasikan surplus ekonomi rumah tangganya ke bidang usaha non tani, misalnya membuka kios saprodi, usaha angkutan, menjual beras dan sebagainya (Salman, 1995; 44-48). Ironisnya petani (peladang) miskin tetap saja miskin dalam keadaan subsisten.

Ilustrasi lain tentang penetrasi yang menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat, terutama di daerah Riau, adalah dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka sistem “*Kebatinan*”

sepanjang Cenaku Riau berubah menjadi desa-desa definitif. *Batin* sebagai pemangku adat dan pemimpin masyarakat dalam tatanan kehidupan Talang Mamak, semakin tidak berfungsi dan kehabisan pengaruhnya.

Selain itu, dengan dibukanya transmigrasi di daerah ini pada tahun 1981-1983 telah mengusik kedamaian masyarakat. Sebagian besar lahan perkebunan masyarakat sebagai sumber ekonomi telah dialih fungsikan untuk pemukiman dan lahan usaha tani bagi transmigran. Tak terhitung kerugian masyarakat Cenaku dengan kehadiran saudaranya dari Pulau Jawa. Berbagai usaha masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi berakhir dengan kepasrahan dan surat nasib yang harus diterimanya. Pada hal, penggusuran kebun karet yang dilakukan oleh banyak perusahaan banyak dilakukan secara paksa dan dengan pendekatan secara licik. Sebagai contoh kebun karet di daerah Sipang di kecamatan Siberida (tahun 1996 lalu) hanya diganti sekitar Rp.50.000,00 hingga Rp.2000.000,00 / ha, pada hal dari kebun itu masyarakat setiap harinya mendapatkan hasil 20 Kg getah karet atau Rp.15.000.000,00 per tahun (Chamsoe, 1998; 10-11).

Ilustrasi lain adalah hancurnya Hutan Lindung Bukit Batabuh (HLBB) di Kecamatan Kuantan Mudik (dahulu wilayah ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu, kini akibat pemecahan berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi), telah habis dan telah mengubah air sungai sudah tidak sejernih dahulu lagi, akibat banyaknya eksploitasi hutan dan banyaknya pendatang ke daerah tersebut kini telah bermunculan warung remang-remang dan semakin suburnya perilaku amoral. Ada sekitar 60 warung yang mensuplai kebutuhan fisik dan moral di daerah itu sekarang. Pada hal, masyarakat Lubuk Jambi dan

sekitarnya dahulu masyarakat yang agamis dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat.

Dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang kini berada di Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu adalah kabupaten yang cukup banyak memiliki kawasan Proyek Inti Rakyat (PIR), areal transmigrasi dan HPH, bahkan sejak awal 1980-an proyek PIR telah masuk ke daerah ini. Demikian juga perusahaan HPH telah menancapkan kukunya sejak awal 1974 hingga saat ini. Kondisi seperti itu tentunya membawa berbagai implikasi secara sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat di sekitar hutan di daerah itu. Dan masyarakat yang paling banyak terkena dampaknya tentunya adalah masyarakat peladang, yang nota bene adalah masyarakat Talang Mamak yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebenarnya dengan masuknya berbagai proyek baik PIR, transmigrasi, Hutan Tanam Industri (HTI), dan HPH ke daerah Riau (khususnya Kabupaten Indragiri Hulu) di satu sisi memberikan keuntungan bagi pengembangan daerahnya, namun di sisi lain juga telah menyebabkan posisi masyarakat lokal (Masyarakat Talang Mamak) semakin sulit. Karena sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Talang Mamak umumnya hingga kini masih banyak yang melakukan perladangan dengan tradisi ladang berpindah. Menurut Michael Dove dan Sugeng Martopo mengemukakan bahwa :

“ Sistem pertanian ladang berpindah pada zaman dahulu bukan merupakan cara pengolahan tanah yang tidak baik. Wajar kalau cara perladangan berpindah ditempuh oleh penduduk asli. Hal ini disebabkan karena pada jaman itu penduduk sedikit, tanah masih luas, dan teknologi modern belum dikenal, sehingga penyediaan pupuk dalam waktu singkat tersedia bagi tanaman tidak ada. Disamping itu peralatan yang digunakan untuk mengolah tanah masih sederhana. Kesuburan tanah diserahkan

pada proses alami dengan cara membuka areal baru untuk bertani, setelah dua sampai tiga kali ditanami. Dengan bertambahnya penduduk dan dengan wilayah yang semakin terbatas, maka sekarang masa beronya menjadi semakin singkat. Tentu saja lama kelamaan sistem ini yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi” (Dove dan Martopo, 1987;63).

Apalagi bila dikaitkan dengan sejak masuknya perkebunan besar ke daerah Riau pada tahun 1980-an, baik PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) maupun Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), proyek transmigrasi, HTI, HPH dan proyek-proyek lain, maka saat ini areal hutan primer dan sekundernya di daerah Riau telah banyak berubah menjadi hutan sawit dan karet.

Konsekuensi lanjutan dari berbagai proyek itu ialah; semakin terkikisnya sejumlah areal hutan dan areal perladangan masyarakat Talang Mamak. Sementara masyarakat Talang Mamak yang bermukim di sekitar hutan telah terbiasa melakukan perladangan berpindah dan mereka sangat tergantung kehidupannya pada hutan sekitarnya. Maka munculnya beberapa proyek ke daerah mereka telah mengakibatkan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka.

Konflik kepentingan ini terutama sangat dirasakan oleh mereka (suku Talang Mamak), karena hilangnya kedaulatan mereka terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan yang selama ini bebas mereka ambil yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Fenomena ini bila dikaitkan dengan analisis Weber, ialah bahwa untuk memahami perilaku sosial individu, dibutuhkan pemahaman jenis perilaku sosial yang berfungsi dalam rangka mempertahankan hidup dan berkesinambungan. Sekurang-kurangnya

hubungan ini diasumsikan bahwa mereka yang terbiasa berladang pindah akan berada dalam tingkatan adaptasi dan penyesuaian diri terhadap sistem perubahan yang berlaku.

Oleh sebab itu ekosistem hutan yang terganggu akibat masuknya berbagai proyek akan menyebabkan putusnya mata rantai sosial ekonomi maupun budaya mereka sehubungan dengan preferensi mereka sebagai komunitas yang terbiasa hidup di hutan, yang pada gilirannya beberapa subsistem kehidupan mereka tidak berfungsi secara normal lagi, maka mereka harus mencari model baru dalam menyiasati perubahan itu. maka tepatlah apa yang disampaikan oleh Singarimbun dalam Proseding Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Rakyat Kalimantan yang diadakan di Pontianak pada tanggal 4 - 8 Agustus 1991, yang menjelaskan: “

“ Masuknya HPH mendatangkan boom yang menguntungkan bagi penduduk Kalimantan pada umumnya, namun bagi bangsa Dayak boom tersebut hampir selalu berdampak pada terdesaknya sumber kehidupan mereka (Florus, 1994; 59) ”.

Kondisi sebagaimana dikutip di atas nampaknya telah terjadi pula di daerah Riau, khususnya yang dirasakan oleh Masyarakat Talang Mamak di sekitar hutan Kabupaten Indragiri Hulu. Laju deforestasi ini penyebabnya hampir sama di setiap tempat, yaitu:

“ Deforestation occurs in many ways. The majority of rain forest cut down is cleared for agricultural use-grazing of cattle, planting crops. Poor farmers chop down as small area. Commercial logging is another common form of deforestation, cutting trees for sales as timber or pulp. Commercial logging uses heavy machinery, such as bulldozer, road graders, and log skidders, to remove cut tress and build roads. The heavy machinery is damaging to a forest as the chainswas to the trees” (Anonim, 2003; 1).

Dari penyebab deforestasi sebagaimana dinyatakan di atas, nyatalah bahwa penyebab utama kerusakan hutan karena perkebunan, komersial logging, dan industri kayu olahan. Sedangkan masyarakat kecil meskipun melakukan praktek penebangan liar umumnya masih dalam skala yang terbatas. Selain itu, dengan maraknya industri kehutanan, kawasan hutan menjadi semakin terbuka dari dunia luar.

Keterbukaan hutan ini di satu sisi menguntungkan bagi masyarakat Talang Mamak karena akses mereka terhadap dunia luar semakin terbuka. Dengan kata lain adanya jalan *logging* yang dibuat perusahaan telah membuat masyarakat Talang Mamak dapat menjual hasil hutannya ke pasar-pasar terdekat yang selama ini sulit dijangkau. Namun di sisi lain, terbukanya hutan menyebabkan banyaknya masuk migran dan oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab melakukan pencurian kayu dan *illegal logging* bekerjasama dengan aparat.

Bentuk penetrasi kapital terhadap kehutanan di daerah Riau dewasa ini semakin marak, misalnya industri pulp yang sejak awal 1980 an sudah ada dan konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu PT. Indah Kiat Pulp dan Paper dan PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang semuanya membutuhkan bahan baku dari hasil hutan. Ini belum termasuk beberapa perusahaan HPH, Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan pembukaan perkebunan sawit pola KKPA yang banyak bermunculan.

Pada hal akibat deforestasi industri besar ini perlu reboisasi dan perbaikan hutan dalam jangka waktu yang panjang, daripada deforestasi yang disebabkan oleh alat-alat tradisional.

Tabel 2.1.
Type of Damage and Extent Estimated for Central American Lowland Rain
Forest

Damage Type	Damage to Biodiversity	Time Recovery (in years)
Logging <ul style="list-style-type: none"> • Light Selective • Selective • Clear cut 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal • Minimal • Minimal 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 – 20 • 10 – 30 • 30 – 50
Peasant Agriculture <ul style="list-style-type: none"> • Structurally diverse • Monotonous 	<ul style="list-style-type: none"> • Intermediate • Large 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 – 75 • 75 – 100
Modern Agriculture <ul style="list-style-type: none"> • Cattle ranch • Intensive Fruit Production 	<ul style="list-style-type: none"> • Very large • Extreme 	<ul style="list-style-type: none"> • 80 – 175 • 100 +

Sumber : John Vandermeer, 1996: 224

Kembali bila kita amati dari sajian ilustrasi pada tabel 2.1 terlihat bahwa akibat penggunaan hutan tidak bertanggung jawab, kerusakan keanekaragaman hayati yang terjadi bervariasi. Variasi itu terlihat bila hutan digunakan untuk *logging* (sepanjang masih dilakukan selektif *logging*) kerusakan yang terjadi masih dalam batas minimal, walaupun perlu reboisasi masih bisa dilakukan sekitar 0-20 tahun. Tetapi bila penggunaan hutan itu sudah mengarah ke monokultur, bahkan digunakan untuk lahan pertanian. Maka kerusakan itu sangat luas (*ekstrim*) dan membutuhkan waktu perbaikan di atas 100 tahun.

Dewasa ini berdasarkan pengamatan penulis, kasus kerusakan hutan di daerah Riau banyak disebabkan oleh *illegal logging* dengan pola *clear cut* dan HTI serta Perkebunan Besar yang mengarah pada *monokultur* yaitu kelapa sawit. Bila kita amati dengan prediksi reboisasi dari tabel di atas, untuk kasus seperti ini diperlukan waktu sekitar 50-75 tahun. Bila demikian bagaimana hal dengan masyarakat Talang Mamak ?. Bukankah selama ini mereka sangat

tergantung hidupnya pada ekosistem hutan ?. Bagaimana pula bila hutan itu kini rusak dan membutuhkan waktu *recovery* yang panjang ?. Sementara mereka belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari sektor kehutanan, sebab hutan dengan segala isinya sudah demikian mewarnai sisi hidup dan kehidupan mereka.

Harus diakui kini hutan Riau sudah penuh sesak dengan manusia dan berbagai perusahaan kehutanan. Akibatnya hutan kini sudah rusak, bukan hanya harimau, gajah, babi hutan, dan monyet yang terdesak tetapi juga masyarakat Talang Mamak, mereka kian terjepit. Mereka yang selama ini tergantung pada kemurahan alam, karena alam memberikan segala yang mereka perlukan, mulai dari kayu bakar, rotan, karet, buah-buahan, protein hewani, dan lain sebagainya kini sudah mulai kurang bersahabat dengan mereka. Ironisnya kehilangan persahabatan mereka dengan alam ---- “ tidak sepenuhnya “---- dilakukan oleh mereka, namun lebih banyak disebabkan oleh intervensi dan penetrasi program yang masuk ke daerah mereka.

Ilustrasi dan keterdesakan masyarakat hutan akibat berbagai bentuk penetrasi yang ada, ada cerita yang menarik dari seorang antropolog Amerika bernama Michael Dove yang mengatakan :

“ Luas Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduknya yang relatif sedikit sebenarnya telah sesuai untuk hajat hidup orang Dayak untuk melakukan ladang berpindah. Namun menurut kacamata pemerintah, dengan jumlah penduduk yang sedikit, Kalimantan adalah sasaran utama untuk program transmigrasi dengan mendatangkan penduduk dari pulau Jawa. Selain itu, ada anggapan yang keliru di mana dalam sistem perladangan ada periode tanah diistirahatkan (*in fallow*), sementara dari sudut pandang pemerintah kolonial dan pascakolonial menafsirkan secara sederhana sebagai tanah “ ditelantarkan” dan karenanya merupakan tanah negara yang “ bebas” untuk diambil ” (Dove, 1985).

Fenomena apa yang disitir oleh Dove (1985) sebenarnya terjadi juga untuk kasus daerah Riau. Selama ini banyaknya program pemerintah yang diintroduksikan ke daerah Riau telah mendesak kehidupan masyarakat Talang Mamak. Tanah-tanah yang mereka istirahatkan umumnya dianggap sebagai tanah ditelantarkan dan tak bertuan. Selain itu, banyaknya program HPH, HTI, PBSN, dan Transmigrasi telah banyak pula mendatangkan sejumlah migran ke daerah Riau (termasuk Kabupaten Indragiri Hulu di mana orang Talang Mamak bermukim).

Berdasarkan amatan penulis, ada beberapa keunikan yang perlu diperhatikan dalam soal kedatangan para migran ini. Sebagian besar para migran ini yang masuk ke daerah Riau adalah mereka yang berpendidikan rendah. Kenyataan ini memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi perimbangan ekonomi dan tenaga kerja yang dimiliki oleh penduduk pribumi Melayu Riau secara umum (termasuk salah satunya Masyarakat Talang Mamak). Karena sebagian besar lahan ekonomi dan lapangan kerja yang seharusnya dimiliki dan diraih penduduk pribumi akhirnya direbut oleh para migran ini. Pengkaplingan hutan-hutan ini membawa konsekuensi dengan semakin banyaknya para buruh migran yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang muncul kemudian. Selain banyaknya buruh migran, program transmigrasi pun telah pula memperbanyak jumlah pendatang baru yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi memperkecil ratio hutan dan masyarakat.

Ilustrasi keterdesakan masyarakat Riau (khususnya masyarakat Talang Mamak) terutama dalam hajat hidupnya terhadap ekosistem hutan ini dapat dianalogikan dengan kasus di daerah Madagaskar Afrika sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Area of the Eastern Rain Forest of Madagascar, for before Human Arrival, 1950 -1985, and for high, medium and low population densities

Year	Aerial Extent ($ha \times 10^6$)	Forest Remaining (%)	Deforestation rates from 1950 to 1985 ($ha \times 10^3/year$)
	High density > 10 people per square kilometer		
Before Humans	4.7	100	43
1950	2.4	50	
1985	0,89	19	
Medium density 5 – 10 people per square kilometer			
Before humans	3.4	100	37
1950	2.5	76	
1985	1.6	51	
Low Density < 5 people per square kilometer			
Before humans	3.1	100	31
1950	2.7	86	
1985	1.6	51	
T o t a l			
Before humans	11.2	100	111
1950	7.6	67	
1985	3.8	34	

Sumber : Sussman dan Green dalam Sponsel dkk, 1996; 301

Tabel 2.2 mengilustrasikan di daerah Madagaskar antara kepadatan penduduk di bawah 5 orang/km² hingga di atas 10 orang/km² dengan adanya penambahan populasi manusia menunjukkan terjadinya laju kerusakan hutan (*deforestasi*) yang berbeda. Buktinya sebelum adanya manusia hutan masih lestari sebesar 100%. Untuk kasus jumlah populasi di atas 10 orang/km² sejak tahun 1950 – 1985 kerusakan hutan terjadi sebesar 43.000/ha/tahun, sementara

untuk tahun yang sama dengan kepadatan yang berbeda menunjukkan laju pengurangan kerusakan hutan. Kerusakan hutan hanya terjadi 37.000/ha/tahun.

Bila demikian halnya, maka dengan banyaknya migran dan perubahan komposisi hutan di daerah Riau, konsekuensinya laju kerusakan hutan akan semakin cepat. Kenyataannya, dalam pembukaan hutan untuk perkebunan dan transmigrasi di daerah Riau sebagian besar dengan menggunakan alat-alat berat. Pada hal sebagaimana dilansir oleh Emilio Moran (1979) bahwa untuk pembukaan lahan pada daerah berpasir kuarsa dengan menggunakan alat-alat berat bukanlah sesuatu yang dianggap baik, bahkan justru sebaliknya menyebabkan penurunan produksi. Pernyataan Moran ini didasarkan dari hasil pengamatannya di daerah Yurimagus, Peru. Di mana dengan penggunaan alat-alat berat dalam pembukaan lahan pertanian telah menyebabkan penurunan produksi setiap tahunnya.

Tabel 2.3.

Effects of Land-Clearing Methods and Fertilization on Crop Production on an Ultisol From Yurimagus, Peru (tons/ha)

No	Land-Clearing Method	Fertility Treatment	Continuous Upland Rice					
			2 nd year	3 rd year	4 th year	Cassava	Soybeans	Guinea grass (annual production)
1.	Slash and burn	None	1,93	1,36	0,77	22,5	0,72	9,9
		Complete	3,20	3,53	2,00	34,2	2,34	24,1
2.	Bulldozer clearing	None	1,09	0,92	0,20	10,1	0,12	8,3
		Complete	2,52	3,19	1,42	32,0	1,31	18,4

Sumber : Emilio F Moran, 1979; 271

Harus diakui bahwa pembukaan lahan perkebunan dan transmigrasi di Indonesia sebagian besar menggunakan alat-alat berat. Dari kondisi ini, maka

terjadilah pemindahan kemiskinan dari Jawa ke luar Jawa. Buktinya banyak dilaporkan tentang kegagalan program transmigrasi ini. Bahkan karena terjadi penurunan produktivitas dari lahan utamanya, para transmigran akhirnya melakukan perladangan sebagai upaya adaptasi dan bertahan hidup.² Dengan demikian nyatalah bahwa kondisi alam menyebabkan mereka mengharuskan perladangan (*determinisme lingkungan*).

Bila demikian, bagi mereka yang sudah lama bermukim di daerah Riau yang sudah teruji oleh pengalaman dalam perladangan, untuk kemudian diupayakan berubah atau oleh sesuatu sebab diharuskan berubah, maka secara tidak langsung telah merubah pola budaya mereka. Pada hal menghentikan kegiatan mereka berladang sama dengan menghentikan kehidupan mereka, yang biasa mereka kerjakan, dan yang menjadi sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi kelangsungan hidup mereka, mengubah kebudayaan mereka berarti mengubah pranata-pranata sosial dan berbagai adat istiadat yang berkaitan dengan itu, bahkan mengubah berbagai ritme biologi dan kejiwaan atau mental mereka (Suparlan, 1993; 29-37).

Sehubungan dengan itu, bila ingin mengetahui dasar perubahan kelembagaan dalam hubungan ekologi, sebenarnya harus lebih dahulu diketahui tingkat kerugian manusia yang dapat diterima. Kerugian itu harus selalu diukur dengan toleransi yang minimal (seperti dalam hal makanan, hubungan antara kelaparan dan kelangsungan hidup) dan toleransi tempat

² Kajian ini dijelaskan oleh Laurentius Dyson (1986) atau dapat dilihat juga dari hasil penelitian Oekan S Abdoellah, *Indonesian Transmigrants and Adaptation an Ecological Anthropological Perspective*, Submitted in Partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of The University of California at Berkeley, May 22, 1990. Bandingkan juga dengan tulisan Werner Roell, Kassel dan Albert Leeman, *Lombok: Transmigrasi Lokal dan Antar Pulau; Sebuah Sumbangan*

tinggal. Karena itu pengalihan sistem berladang yang tidak sejalan dengan kebutuhan sekarang akan menimbulkan masalah besar. Karena konsep yang banyak dibahas dan diadopsi sekarang ini merupakan suatu model dari barat yang asing bagi kebudayaan asli, sehingga penerapannya dibayangi keraguan. Karena itu masalah yang dihadapi dalam upaya mengendalikan kegiatan ladang berpindah terletak pada masalah konseptual dan teoretikal mengenai hakekat dan proses sosial budaya suatu masyarakat.

2. Roadmap Penelitian.

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian Strategi adaptasi dalam Perubahan lingkungan pada masyarakat Talang Mamak yang diterbitkan dalam Jurnal Habitat April 2008 Vol XIX no.1. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Talang Mamak kian mengecil aksesnya terhadap ekosistem hutan dan cenderung mengalami involusi dalam pendapatan mereka. Keterdesakan mereka akan akses SDA hutan semakin menggeliat saja akhir-akhir ini.

Maka kajian ini merupakan kajian yang akan mencoba memotret kehidupan masyarakat adat Talang Mamak dalam menyiasati kehidupan mereka yang semakin sulit. Proses ilegal logging yang juga dilakukan masyarakat setempat semakin memperumit ruang gerak mereka dan merekapun terjebak pada situasi dan dinamika kehidupan seperti itu. Kearifan lokal dan ekonomi mereka tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Maka kajian ini akan menghasilkan temuan bagaimana strategi memberdayakan mereka dengan berbasis ekonomi hutan (SDA) dengan tetap mencoba

mengadaptasi kearifan lokal yang ada di dalam budaya mereka agar mereka tidak tercabut dari akar budayanya.